

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman (et,al), Pengelolaan administrasi Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta, UPP STIM YKN, 2018.
- BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, 2015.
- Dwipayana dan Eko, Membangun Good Governance di Desa, IRE Press, 2003.
- HAW Wijaya, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang Nomro 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, Setara Press, 2005.
- Hendi Budiamana dan Dewi Mulyanti, Keadilan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Desa, Edisi Pertama, Jakarta, Damera Press, 2025.
- Huraerah Abu, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Bandung, Humaniora, 2008.
- Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Cetakan I, Yogyakarta, PolGov Fisipol UGM, 2013.
- Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat , Malang, Setara Press, 2014.
- Mohammad Mulyadi, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Yogayakarta, Nadi Pustaka, 2018.
- Moynihan D.P., Normative and Instrumental Persepective on Public Participation, American Reviw of Public Administrastion, USA, Sage Publication, 2003.
- Muhammad Arifin, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReDPost Press, 2007.
- Nimatul Huda , Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rachmat Krisyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakaarta, Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Ilmiah, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006.

Surachmad Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, Bandung, Tarsito, 1990.

Suratman Philips, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2014.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, 2019.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Sumber Lainnya

Pemerintahan Desa Cihaubeuti.